

KPK Tegur

Pemkab

Gara-gara Penyerahanan Fasum-fasos dari Pengembang Cuma 16 Persen

KARAWANG- KPK meminta Pemkab Karawang melakukan inovasi untuk mempercepat penyerahan Prasarana-Sarana Utilitas (PSU) atau fasilitas sosial (fasos)-fasilitas umum (fasum) oleh pengembang. Sebab, KPK menilai penyerahan fasum-fasos dari pengembang di Karawang ternilai masih rendah.

“Menurut catatan kami, penyerahan fasum-fasos dari pengembang ke pemda untuk Kabupaten Karawang baru 16%. Hal ini harus menjadi perhatian

bersama dan pemda perlu melakukan langkah-langkah inovasi percepatan,” kata Perwakilan Satgas V Koordinasi Pencegahan KPK Tri Budi Rochmanto dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9).

Hal itu disampaikan Tri Budi pada saat rapat monitoring evaluasi (monev) secara daring, kemarin (8/9). Tak hanya Pemkab Karawang, KPK juga turut menegur Pemkot dan Pemkab Bekasi. Dalam rapat itu, ketiga Pemda itu menyampaikan beberapa persoalan terkait biaya dan keberadaan

pengembang yang sudah tidak diketahui lagi oleh pemda.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Karawang, Aceh Jamhuri mengatakan dari 20 pengembang di Karawang, hanya 11 pengembang udah menyerahkan PSU kepada Pemda pada 2020. Ia menyebut mayoritas yang telah diserahkan ke Pemda mayoritas lahan tempat pemakaman umum (TPU).

“Mayoritas PSU berupa TPU dengan luas 4 hektar. Total Perumahan di